

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama perusahaan publik ialah mencari keuntungan seoptimal mungkin yang berasal dari penerimaan pendapatan. Pendapatan bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti penjualan, deviden, royalti, bunga, dan sewa. Nilai pendapatan di laporan keuangan menjadi salah satu indikator bagi para pengguna laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan, dan mendapatkan informasi mengenai posisi keuangan (Veronica, dkk, 2019). Pendapatan menjadi salah satu akun yang penting sehingga nilai dari pendapatan tersebut harus diakui secara wajar sesuai prinsip pendapatan yang berlaku.

Perusahaan melakukan pencatatan, pengakuan, perhitungan mengacu pada standar akuntansi yang telah berlaku di Indonesia. Standar yang digunakan oleh perusahaan publik yaitu PSAK-IFRS, dimana Indonesia melakukan adopsi terhadap IFRS. Menurut Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan Indonesia, pengadopsian standar IFRS bertujuan untuk menyesuaikan SAK di Indonesia dengan akuntansi Internasional. PSAK yang mengatur tentang pendapatan salah satunya tercantum dalam PSAK 72.

Kebijakan PSAK 72 mengacu pada IFRS 15 dan menggantikan pedoman sebelumnya yaitu PSAK 23 mencakup pendapatan, PSAK 34 mengenai kontrak konstruksi, PSAK 44 terkait aktivitas pengembangan real estate, ISAK 10 mengenai program loyalitas pelanggan, ISAK 21 mengenai perjanjian konstruksi real estate, dan ISAK 27 mengenai pengalihan aset dari pelanggan. Adanya perubahan standar ini berdampak pada industri tertentu seperti telekomunikasi, dan retail. Menurut Martani (2020), PSAK 72 menjabarkan tentang semua hal yang berkaitan pada pendapatan kontrak dengan pelanggan, namun ada pengecualian terhadap kontrak sewa, kontrak asuransi, dan instrumen keuangan. PSAK 72 ini mulai berlaku efektif di tahun 2020 dengan tujuan dalam penyampaian informasi laporan keuangan sesuai dengan kontrak pelanggan dalam hal sifat, waktu, jumlah, serta ketidakpastian pendapatan dan arus kas.

Pengakuan pendapatan dalam PSAK 72 baru bisa diakui apabila sudah melakukan serah terima barang dan memenuhi analisis lima tahapan yaitu, mengidentifikasi kontrak pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan/kinerja, menentukan harga, mengalokasikan harga, dan mengakui pendapatan saat pemenuhan kewajiban pelaksanaan telah terjadi. Berbeda dengan PSAK 23 yang mengakui pendapatan pada saat manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar akan terjadi dan dapat diukur dengan andal (Puspamurti, dkk, 2020). Menurut Erika (2019), PSAK 72 lebih menitikberatkan pada perpindahan kontrol dalam mengakui pendapatannya, hal ini membuat kemungkinan entitas dapat mengakui pendapatannya bisa lebih cepat atau lambat. Perbedaan pengakuan dengan PSAK sebelumnya akan memengaruhi perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan. Beberapa penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa PSAK 72 menjelaskan secara lebih rinci terkait pengakuan pendapatan karena harus melalui lima tahapan analisis.

PT X adalah perusahaan jasa dan dagang yang bergerak di bidang remanufaktur komponen alat-alat berat. Perusahaan ini menjual komponen-komponen alat berat, selain itu perusahaan juga memberikan layanan jasa seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

halnya perawatan dan perbaikan terhadap komponen alat berat tersebut. Penjualan menjadi sumber utama pendapatan dan perusahaan menggunakan PSAK 72 dalam melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, serta pengungkapan pendapatan.

Terdapat pembaharuan kebijakan pengakuan pendapatan dalam PSAK 72. Hal tersebut mendorong penulis untuk menganalisis kesesuaian perlakuan pendapatan pada perusahaan dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Perlakuan Akuntansi Pendapatan atas Penjualan berdasarkan PSAK 72 pada PT X”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kebijakan penjualan pada PT X?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan atas penjualan pada PT X?
3. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi pendapatan atas penjualan di PT X dengan PSAK 72?

1.3 Tujuan

Tujuan yang selaras dengan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi kebijakan penjualan yang dilakukan pada PT X.
2. Mengidentifikasi perlakuan akuntansi pendapatan atas penjualan pada PT X.
3. Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pendapatan atas penjualan di PT X dengan PSAK 72.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari tugas akhir ini antara lain.

1. Bagi penulis, dengan adanya tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan praktek dan menambah pengalaman dari teori yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan.
2. Bagi perusahaan, laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kajian terkini terkait perlakuan akuntansi pendapatan berdasarkan PSAK 72, sehingga dari kajian tersebut bisa dijadikan masukan untuk penyempurnaan atas kesesuaian perlakuan akuntansi pendapatan yang telah diterapkan perusahaan.

1.5 Ruang Lingkup

Pembahasan pada laporan tugas akhir berjudul **“Tinjauan Perlakuan Akuntansi Pendapatan atas Penjualan Berdasarkan PSAK 72 pada PT X”** terfokus pada pendapatan atas penjualan yang dilakukan pada PT X.

